

Legitimasi Politik di Makam Tuan Guru: Perilaku Ziarah Politisi Lokal ke Tarekat Naqsyabandiyah Babussalam (TNB)

Ziaulhaq*

Abstrak

This article is related to politicians' ziarah act to Tarekat Naqsyabandiyah Babussalam (TNB). TNB is a phenomena that is always related to political moment such as regional election and legislative election. The phenomena is important to be showed about how local politicians' ziarah act in TNB. This articles' objective is to answer the questions have been proposed. As long the research has been done, can be found that local politicians' ziarah act in TNB is to get the master's praying and members' praying. In ziarah activity there are reciting Yasin 41 and praying in front of the founder's funeral. As a legitimation for politician can be seen as follow: publication of ziarah activity on printed media and electronic media; putting the master's photograph on banners in public sphere; coming to haul of TNB; and using TNB's activity.

Kata Kunci: Legitimasi, Politik dan Tuan Guru

A. Pendahuluan

Tarekat sebagai institusi keagamaan memiliki peran tersendiri di masyarakat sebagai ordo berbasis tradisi yang mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat. Peran tarekat yang dikemukakan penting—bagi masyarakat—tidak hanya dijadikan sebagai referensi keagamaan tradisional, tetapi juga—lebih dari pada itu—tarekat juga memiliki “nilai jual” dan posisi tawar dalam dunia politik (Thohir dan Riyadi, 2002: 2), khususnya relasi tarekat dengan kekuasaan menempatkannya menjadi sesuatu yang banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan struktur sosial masyarakat, terutama elit menengah atas.

Salah satu tarekat yang menarik dikemukakan di sini meminjam istilah Ithack Weismann adalah Tarekat Naqsyabandiyah Babussalam (TNB) yang merupakan mungkin satu-satunya di dunia ini tarekat yang memiliki perkampungan tersendiri (Weismann, 2007: 40). Berkaitan dengan apa yang dikemukakan menurut *Wini Siti*

* Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Sumatera Utara, ziaulhaq@iainsu.ac.id

Sajaroh salah satu tarekat yang mampu membangun dialek politik dengan penguasa lokal ketika awal berdirinya hingga perkembangan selanjutnya adalah Tarekat Naqsyabandiyah (*Sajaroh*, 2005: 60). Kenyataan yang dikemukakan yang menyebabkan TNB sebagai bagian dari Tarekat Naqsyabandiyah yang ada di dunia ini mendapat posisi sebagai ordo resmi yang berkembang di daerah lokal tertentu, khususnya di tengah masyarakat berbasis etnis Melayu Sumatera untuk pengalaman TNB.

Secara genealogi tarekat ini, berdasarkan catatan Fuad Said menyebar di wilayah Asia Tenggara, yang dibuktikan dengan jaringan silsilah jamaah dan situs persulukan yang tersebar luas (Said, 1983: 21). Penegasan lain tentang jaringan tarekat ini dibuktikan dengan banyaknya jamaah yang berkunjung ke TNB ini atau dalam istilah Claude Guillot dan Hendri Lombard-Loir dikunjungi oleh ratusan ribu peziarah, lepas dari keanggotaan mereka pada tarekat atau sama sekali awam terhadap tarekat makam pendirinya dikunjungi oleh peziarah yang jauh lebih besar jumlahnya (Guillot dan Chambert-Lior, 2007: 343). Ini juga berlaku pada TNB, khususnya pada haul tuan guru pendiri tarekat ini diziarahi berasal dari berbagai daerah yang ada di Asia Tenggara menunjukkan luasnya jaringan penyebaran tarekat ini. Haul merupakan peringatan atau lebih tepat disebut perayaan setahun sekali untuk memperingati wafatnya seorang yang ditokohkan seperti tuan guru. Dalam pengalaman TNB biasanya diatur sedemikian rupa kegiatannya dan dalam perayaan ini diadakan pembacaan perjalanan singkat hidup tuan guru untuk menjadi i'tibar bagi jamaahnya.

Menurut Fuad Said tradisi ziarah ke TNB ini tidak hanya dilakukan pada haul saja, tetapi TNB ini tidak pernah berhenti dikunjungi jamaah setiap harinya, baik yang terlibat secara institusional ataupun simpatisan dari berbagai lapisan kelas sosial masyarakat dengan berbagai maksud dan tujuan (Said, 1983: 10). Dari berbagai jamaah yang berziarah ke TNB ini salah satu kelas sosial elit masyarakat adalah kaum politisi. Sejauh ini, berdasarkan informasi yang penulis dapatkan politisi yang ziarah ke TNB ini dari berbagai kalangan, baik politisi lokal hingga politisi nasional, tetapi dalam artikel ini hanya dibatasi pada politisi lokal.

Menarik dikemukakan perilaku ziarah yang dilakukan politisi lokal tentu saja berbeda dengan konvensional ziarah yang dilakukan masyarakat umumnya karena politisi memiliki makna tersendiri ketika berziarah ke TNB ini. Untuk pengalaman TNB ziarah politisi ke TNB ini misalnya berkaitan dengan momen politik seperti Pemilu dan Pileg. Penting dikemukakan sebagaimana tradisi

ziarah politisi yang berbeda dengan jamaah umumnya, maka perilaku ziarah yang dilakukan politisi juga berbeda dengan apa yang dilakukan jamaah lainnya, baik teknis ziarah ataupun ritual yang dilakukan di dalamnya.

Berkaitan dengan apa yang dikemukakan tentu menarik untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut tentang bagaimana perilaku ziarah politisi lokal ke TNB karena ini merupakan sebuah fenomena yang tidak lazim dilakukan oleh para ziarah yang umumnya berkunjung, melainkan hanya dilakukan oleh politisi lokal *an sich*. Untuk itu, pengkajian ini relevan dilakukan dalam upaya menemukan deskripsi yang tepat terhadap fenomena yang dikemukakan, yang dapat dipertegas dalam dua pertanyaan yang menjadi konsentrasi artikel ini, yaitu bagaimana perilaku ziarah politisi lokal ke TNB dan bagaimana bentuk-bentuk legitimasi politik dalam ziarah politisi lokal ke TNB, maka pembahasan selanjutnya merupakan upaya menemukan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan.

B. Tarekat Naqsyabandiyah Babussalam (TNB)

TNB ini didirikan oleh Abdul Wahab Rokan (w. 1811-1926 M) merupakan silsilah ke tiga puluh tiga dari pendiri utama Tarekat Naqsyabandiyah, Baha al-Din Naqsyabandi (w. 1318-1389) melalui jalur Sulaiman Zuhdi (w.?) yang merupakan seorang guru Tarekat Naqsyabandiyah yang banyak memiliki murid sebagai pengembang Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia. Secara resmi Rokan ini mendapat ijazah dan mandat dari Sulaiman Zuhdi (w.?) untuk mengembangkan tarekat ini ke daerah berbasis etnis Melayu sesuai dengan etnis pendiri TNB ini (Said, 1983: 22). Penyematan label “Babussalam” di belakang nama tarekat ini berkaitan dengan nama kampung yang didirikan oleh Rokan sendiri yang disebut dengan nama “Kampung Babussalam”, yang diduga terinspirasi dengan nama sebuah pintu yang ada di Masjid Haram tempat Rokan “nyantri” ketika menuntut ilmu di Mekah (Said, 1983: 22). Penting untuk dikemukakan bahwa Rokan sendiri—sesuai dengan laqab di belakang namanya—sebenarnya merupakan nama sebuah daerah yang ada di Provinsi Riau, yaitu Rokan Hulu, tetapi dalam perkembangannya TNB ini justru berpusat di daerah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang juga dikenal sebagai daerah berbasis etnis Melayu karena selain di Riau dan juga sampai ke Malaysia Rokan juga lama menetap di Langkat hingga akhir hayat.

Sebagai sebuah tarekat yang memiliki ciri umum menonjol dari TNB ini adalah kemampuan dialektika politik dengan penguasa lokal, sehingga tarekat ini dapat diterima sebagai sebuah ordo resmi

dalam masyarakat yang ada di Langkat dan Sumatera (*Sajarah, 2005: 10*). Apa yang dikemukakan ini, tentu saja berkaitan dengan kemampuan pendiri TNB ini dalam “mempengaruhi” Sultan Langkat ketika itu. Bahkan, penguasa lokal itu menjadi bagian dari pengamal dan pelindung TNB itu sendiri, sehingga tidak terlalu mengherankan kalau TNB ini memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat Langkat karena didukung kekuatan penguasa. Tidak hanya itu, TNB ini mendapat pengakuan khusus oleh penguasa lokal, yang dibuktikan dengan adanya penyediaan lahan sebagai pusat aktifitas tarekat yang berasal dari hadiah Sultan Langkat kepada Rokan untuk mengembangkan TNB ini (*Ziaulhaq, 2012: 12*).

Dalam perkembangannya, TNB ini tidak pernah berhenti dikunjungi oleh para peziarah—yang terlibat dalam ordo TNB ataupun tidak—baik ketika pendiri tarekat ini masih hidup ataupun setelah wafat dan dilanjutkan zuriatnya, datang untuk berkunjung dan sekaligus menyampaikan berbagai hajat keinginan. Sebab, TNB ini dalam pandangan masyarakat Sumatera Utara merupakan sebuah tempat karamah yang dianggap dapat mendatangkan kebaikan bagi setiap pengunjung. Untuk itu, TNB ini menjadi sangat dikenal luas di masyarakat selain sebagai ordo juga sebagai referensi keagamaan tradisional yang berafiliasi dalam upaya menjaga dan mengembangkan tradisi yang ada di dalam masyarakat.

Posisi TNB ini mengikuti pengklasifikasian tarekat konvensional merupakan bagian dari tarekat mu'tabarrah yang memiliki silsilah yang terhubung langsung kepada Nabi Muhammad, melalui jalur Abu Bakar dan tabi'in dan tabi' tabi'in yang dikenal luas dalam khazanah tasawuf (*Huda, 2008: 63*). Eksistensi TNB sebagai bagian dari tarekat mu'tabarrah ini tentu saja memiliki pengaruh tersendiri dalam upaya penyebarluasan tarekat karena biasanya tarekat yang dianggap sebagai bagian dari yang mu'tabarrah akan mendapat dukungan dari penguasa dan institusi keagamaan yang ada di masyarakat, sehingga TNB dapat berkembang secara baik sebagaimana saat ini telah menyebarluas ke berbagai daerah yang berbasis etnis Melayu, baik yang ada di dalam negeri ataupun luar negeri sebagai penegasan bahwa TNB ini memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat etnis Melayu.

Jaringan TNB ini dapat disebut merupakan salah satu tarekat yang paling kuat berpengaruh di Sumatera Utara, khususnya daerah yang berbasis masyarakat etnis Melayu, termasuk juga Riau (*Ziaulhaq, 2012: 21*). Jaringan keseluruhan TNB ini mencakup Malaysia dan Singapore yang tersebar luas di berbagai daerah negara serumpun bahasa dan budaya Melayu yang dikemukakan karena

memang jaringan ini memang secara khusus dibangun Rokan yang sengaja menyebarkan TNB ini. Selain itu juga kedua negara yang disebut memiliki hubungan khusus dengan Melayu yang ada di Sumatera dan Riau, baik dari sisi genetis ataupun budaya yang dalam banyak hal ditemukan kedekatan yang saling menghubungkan jaringan TNB ini.

Selain itu, jaringan penyebaran tarekat ini secara umum dapat dilihat dari penyebaran para khalifah yang berada di bawah asuhan Rokan. Berdasarkan catatan yang ada setidaknya dapat dilihat jaringan penyebaran khalifah ini tersebar ke berbagai daerah misalnya untuk Sumatera Utara seperti Langkat, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Asahan, Labuhanbatu, Kota Pinang, Tapanuli Selatan, termasuk juga Aceh, sedangkan untuk Riau mencakup daerah Tembusai, Tanah Putih, Rambah, Kota Intan, Bangka, Inderagiri, Rawa, Kampar, selain dari itu ada juga yang berada di Sumatera Barat, Jawa Barat, Malaysia, Kelantan dan Cina, tetapi untuk di Cina tidak diketahui bagaimana proses perkembangannya (Ziaulhaq, 2012: 21).

C. Perilaku Ziarah Politisi Lokal ke TNB

1. Mekanisme Ziarah

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya perilaku ziarah politisi ke TNB umumnya berkaitan dengan momen politik tertentu seperti pemilukada dan pileg. Momen politik yang dikemukakan menjadi pilihan waktu ziarah politisi karena berkaitan dengan kepentingan politisi itu sendiri terhadap momen tersebut, baik untuk kepentingan pribadi ataupun partai dianggap sebagai bagian dari upaya meningkatkan elektabilitas dan popularitas (Ziaulhaq, 2012: 21), maka tentunya politisi lokal umumnya hanya berziarah pada momen tersebut dan sangat jarang sekali pada momen di luar yang dikemukakan, kecuali pada momen haul politisi juga berupaya terlibat dalam perayaan tersebut, walaupun intensitasnya lebih rendah dibanding momen yang pertama disebut.

Penting dikemukakan bahwa perilaku ziarah politisi lokal sangat kontras dengan perilaku ziarah yang dilakukan para peziarah lainnya ke TNB. Sebab, para politisi memiliki kepentingan tertentu ketika datang berziarah ke TNB untuk kepentingan politik dan sedikit untuk kepentingan religiusitas. Kepentingan religiusitas ini dapat ditandai dari sikap simpati terhadap TNB karena sebagian kecil darinya menjadi bagian dari pengamal TNB. Bahkan, di antaranya sebagian kecil dari politisi lokal itu justru memiliki hubungan genetis sebagai zuriat di kalangan TNB, sehingga ada

kesan kuat bahwa TNB—di luar kepentingan politik—menjadi sesuatu yang penting bagi politisi dalam ranah keagamaan yang berafiliasi pada ordo tradisional TNB.

Di luar kepentingan religiusitas yang disebut sebenarnya kepentingan yang lebih mengemuka adalah kepentingan politik—sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya—karena berdasarkan perilaku ziarah politisi ke TNB ini justru kepentingan ini lebih menonjol apabila dibanding hanya untuk kepentingan religiusitas *an sich*. Apa yang dikemukakan ini setidaknya diperkuat dengan adanya kenyataan pilihan momen dalam berziarah sebagai bentuk penegasan lain tentang lebih kuatnya kepentingan politik dibanding hanya kepentingan religiusitas. Selain itu, pilihan momen yang disebut berkaitan langsung dengan masalah politik, maka berdasarkan kenyataan yang dikemukakan sebenarnya dapat dikatakan perilaku ziarah politisi merupakan ziarah politik.

Menarik dikemukakan di sini, salah satu perbedaan yang sangat mengemuka perilaku ziarah politisi dengan ziarah masyarakat umum lainnya, yaitu bahwa mekanisme ziarah politisi ini diatur sedemikian rupa, seperti misalnya sebelum berkunjung para politisi terlebih dahulu mengkoordinasikan dengan pihak pengelola TNB tentang kesediaan tuan guru menerima kunjungan atau kapan waktunya para ziarah yang tidak terlalu banyak berkunjung. Dalam proses koordinasi ini lazimnya dilakukan dengan tawar menawar waktu antara kesediaan waktu tuan guru dan peluang kesempatan politisi untuk dapat berkunjung ke TNB (Ismail, 11/08/2013). Setelah disepakati keduanya—politisi dan pengelola TNB—barulah politisi datang berziarah ke TNB dengan diikuti tim kecil sebagai pendamping untuk bertemu dengan tuan guru, termasuk juga—terkadang—awak media cetak dan elektronik sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya.

Ciri umum yang menonjol dari perilaku ziarah politisi ini—walaupun tidak semua melakukannya—adalah memberikan sumbangan ke TNB, baik dalam bentuk bahan makanan ataupun kesediaan membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan TBN (Qahar, 11/08/2013). Pemberian sumbangan ini biasanya dipublikasikan melalui media masa, yang mana tentunya bagi politisi memiliki makna tersendiri secara politik. Sejauh ini, segala bentuk sumbangan yang diberikan politisi diterima secara baik dan dibuktikan dengan beberapa sarana dan prasarana yang ada di TNB merupakan hasil dari sumbangan para politisi seperti misalnya asrama suluk dan tempat penginapan para peziarah yang datang dari

luar kota memberi penegasan bahwa TNB sendiri tidak menutup diri dari segala bentuk upaya mendukung kepentingan politisi tertentu.

2. Ritual yang dilakukan

Dalam pertemuan politisi dengan tuan guru yang telah direncanakan terbangun komunikasi antar keduanya lintas kepentingan. Dalam pertemuan ini politisi lokal meminta izin dan sekaligus doa atas terhadap segala keinginan yang berkaitan dengan masalah politik. Merespon keinginan dan permintaan politisi ini, tuan guru menerima dengan terbuka terhadap semua politisi yang datang, baik dari kalangan yang simpatisan TNB ataupun juga tidak berhubungan sama sekali dengan TNB. Dalam pandangan tuan guru memberikan izin dan doa terhadap siapa saja yang meminta—termasuk politisi—merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Namun, tuan guru juga menggarisbawahi bahwa ternyata siapa di antara para politisi yang datang dikabulkan keinginan dan doa tentu itu semua merupakan ketentuan Tuhan (Syarwani, 07/07/2013).

Menarik dikemukakan bahwa dalam ritual doa politik yang dilakukan tuan guru dilakukan dengan bahasa yang sangat umum dan tidak mengikat pada politisi tertentu. Bahkan, tuan guru juga menggunakan syarat tertentu supaya para politisi yang meminta doa untuk dikabulkan segala keinginan politiknya dengan syarat semisal “kalau seandainya si fulan benar-benar akan membawa kebaikan kepada umat, maka kabulkan keinginannya” (Ismail, 11/08/2013). Pilihan doa yang dilakukan tuan guru sebenarnya merupakan bentuk seni penolakan tersembunyi terhadap segala hal yang mungkin buruk bagi kepentingan masyarakat apabila politisi tertentu yang akan memimpin. Sebab, pada dasarnya, tuan guru juga mengetahui bahwa politisi sangat dekat dengan segala bentuk yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan masyarakat, yang dapat ditandai dengan pandangan tuan guru yang netral terhadap para politisi.

Berbeda dengan para peziarah umumnya, politisi diberikan rekomendasi oleh tuan guru untuk melakukan pembacaan ritual yasin 41. Ritual ini dalam TNB dianggap sebagai bagian dari upaya untuk menunjukkan komitmen dan totalitas dalam upaya mencapai keinginan, walaupun tentunya tingkat keberhasilannya semua diserahkan kepada Tuhan. Menarik dikemukakan, pelaksanaan pembacaan ritual yasin 41 ini mekanisme telah disiapkan beberapa jamaah yang berjumlah 41 orang dengan ketentuan satu orang membaca yasin sampai selesai. Untuk pelaksanaan ritual ini setiap politisi dikenakan biaya yang telah disepakati dengan pimpinan

pelaksana ritual yang langsung ditunjuk tuan guru sebagai pelaksananya.

Setelah itu, sebagaimana lazimnya tradisi yang ada di TNB pasca bertemu dan menyampaikan segala keinginan dan hajat kepada tuan guru, maka selanjutnya para peziarah—termasuk juga politisi—akan berziarah ke makam pendiri TNB ini atau ada juga yang terlebih dahulu berziarah ke makam ini, setelah itu baru kemudian bertemu dengan tuan guru. Di dalam makam ini, ada beberapa pemandu yang membimbing tata cara berdoa di dalam makam tersebut. Para pembimbing ini merupakan bagian dari kelompok jamaah TNB yang dipercayakan untuk menjadi memandu beberapa ritual yang ada di dalam makam tersebut dan umumnya jamaah ini juga merupakan zuriat dari pendiri TNB. Pelaksanaan ritual di makam ini dilakukan dengan menyebutkan tujuan dan keinginan, maka para politisi selalu menyampaikan keinginan politiknya di dalam makam tersebut yang kemudian dilakukan ritual seperti zikir dan doa sebagai upaya untuk tercapainya tujuan politisi tersebut.

Kemudian, setelah prosesi pelaksanaan ritual dilakukan di dalam makam, maka para peziarah dianjurkan untuk memberikan sedekah seikhlasnya, baik di dalam tabung infak yang disediakan ataupun langsung memberikan kepada pemandu ritual tersebut. Dalam hal ini, tidak ada yang berbeda dengan para peziarah umumnya politisi juga melakukan yang sama, tetapi yang dapat disebut sebagai pembedaan politisi dengan para peziarah umumnya adalah jumlah sedekah yang diberikan umumnya selalu di atas jumlah angka yang konvensional diberikan para peziarah, sehingga secara langsung ataupun tidak memberi para pemandu seakan mengetahui hal tersebut, maka selalu memberikan pelayanan penuh terhadap segala keinginan politisi.

Di luar pelaksanaan ritual di dalam makam pendiri TNB ini para ziarah juga dianjurkan untuk membawa pulang air yasin dengan membayar sebagaimana ketentuan harga yang ditentukan. Air Yasin adalah air yang telah dibacakan di atasnya surah yasin, zikir dan doa di dalam tempat air sejenis ember. Kemudian, setelah itu air yasin tersebut dimasukkan ke dalam sumur dan untuk selanjutnya melalui sumur yang telah disediakan kran dimasukkan ke dalam jerigen 2 liter diberikan kepada setiap peziarah yang datang ke makam pendiri TNB. Wawancara dengan Qahar (42 Tahun) khadim TNB, 11/08/2013 di TNB.

Dalam pandangan TNB air yasin merupakan air yang telah dibacakan zikir dan doa di dalamnya, oleh jamaah TNB diyakini sebagai air yang mampu membawa keberhakahan bagi siapa saja

yang meminimum akan terpenuhi segala keinginannya. Dalam hal ini, politisi juga melakukan yang sama, yaitu mengambil air yasin untuk dibawa pulang, tetapi politisi dalam hal—sebagian di antaranya—menerima air yasin tampaknya lebih dari pada upaya untuk menjaga kepercayaan dan tradisi yang berlaku di kalangan TNB dibanding kepercayaan terhadap kemujaraban air tersebut.

D. Legitimasi Politik dalam Ziarah Politisi Lokal ke TNB

Perilaku ziarah politisi lokal ke TNB merupakan bentuk atau mungkin lebih tepat disebut untuk mencari legitimasi simbolik politik. Dalam pemaparan temuan artikel ini menggunakan teori legitimasi, maka dalam pembahasan selanjutnya ini dikemukakan dalam kerangka legitimasi tersebut. Pilihan legitimasi simbolik yang digunakan sangat berkaitan dengan fenomena temuan ini, yang memang menggunakan legitimasi simbolik untuk kepentingan politik dengan memanfaatkan institusi tarekat yang dianggap sebagai simbol ordo keagamaan tradisional yang memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat.

Pada dasarnya, politisi memahami bahwa tarekat sebagai ordo institusi keagamaan memiliki pengaruh dan hubungan yang kuat dalam masyarakat, terutama jamaah pengamal TNB. Sebab, sebagaimana lazimnya sebuah tarekat akan terbangun hubungan patronase antara jamaah dengan tuan guru—ataupun melalui jaringan khalifah—yang berfungsi sebagai *cultural broker* meminjam istilah Geertz (1981: 2) dan pimpinan ordo keagamaan tradisional, yang diperkuat atas doktrin-doktrin tarekat yang memposisikan jamaah sebagai Klein dan tuan guru sebagai patron-nya, sehingga apabila ada legitimasi simbolik politik yang dianggap dari tuan guru, maka tentunya diyakini bahwa jamaah secara otomatis akan memberikan dukungan politik terhadap legitimasi yang didapatkan politisi. Legitimasi simbolik dianggap sebagai bentuk dukungan atau lebih tepat disebut apresiasi politik, maka alasan ini juga yang menyebabkan para politisi lokal banyak yang meminta izin dan doa kepada tuan guru supaya—seakan—mendapatkan legitimasi politik dan untuk selanjutnya diharapkan akan mendapatkan dukungan dari jamaah TNB.

Legitimasi simbolik politik yang didapatkan politisi dilakukan dengan cara memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi dan kepercayaan dalam bentuk simbolik (Surbakti, 1993: 96) untuk mendapatkan legitimasi simbolik politik tersebut dengan cara dan strategi sendiri sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya. Pada dasarnya, tuan guru sendiri—baik secara pribadi

ataupun institusi—tidak pernah memberikan dukungan terhadap politisi tertentu (Syarwani, 07/07/2013). Dalam kaitan ini, menarik dikemukakan di sini bahwa tuan guru tidak pernah memberikan izin memasang foto atau menggunakan atribut tarekat—termasuk foto tuan guru—untuk dijadikan secara simbolik yang berkaitan dengan politik, walaupun ada ditemukan hal ini, maka tuan guru akan meminta untuk “mencopot” segala bentuk yang cenderung dapat menjadikan atribut tarekat menjadi bagian dari upaya peningkatan elektabilitas dan popularitas politisi tertentu.

Sejauh ini, ditemukan ada beberapa bentuk legitimasi simbolik politik yang dilakukan politisi lokal dalam upaya mempengaruhi dan menumbuhkan simpati masyarakat terhadap agenda politik para politisi tersebut.

a. Publikasi Kunjungan Ziarah

Salah satu bentuk legitimasi simbolik politik yang dilakukan politisi lokal dalam upaya menarik simpati masyarakat adalah mempublikasikan setiap kunjungan ziarah ke TNB. Publikasi ziarah ke TNB ini dimaksudkan supaya jamaah khususnya dan masyarakat umumnya mengetahui bahwa sebenarnya ada kedekatan atau paling tidak simpati dari politisi lokal terhadap TNB, yang mana tentunya bagi jamaah pengikut TNB ini dianggap sebagai salah satu bentuk dukungan TNB ke politisi tersebut. Sebab, sebagaimana yang diyakini bahwa tarekat itu sendiri sebagai sebuah institusi ordo keagamaan memiliki daya ikat yang kuat karena adanya hegemonik tuan guru di dalamnya di antara sesama jamaah, yang diperkuat dengan adanya doktrin untuk selalu mengutamakan kepentingan yang berkaitan dengan TNB, termasuk dalam masalah politik (Ziaulhaq, 2012: 26).

Publikasi kunjungan ziarah ini dilakukan dengan menggunakan melalui media cetak dan elektronik dengan menggunakan media koran lokal atau televisi lokal. Untuk kedua bentuk publikasi ini, model publikasi yang pertama melalui koran lokal lebih banyak digunakan karena dari segi biaya publikasi ini jauh lebih murah dibanding yang kedua. Publikasi media koran lokal ini juga disebarluaskan dengan via sms—baik yang dilakukan politisi itu sendiri ataupun timnya—melalui media sosial seperti facebook dan twitter untuk memperluas jaringan informasi tentang kunjungan ziarah politisi lokal. Penting dicatat bahwa sebenarnya publikasi model seperti ini tidak mendapatkan izin dari tuan guru untuk publikasi secara masal, tetapi sejauh ini tidak ada sikap tegas dari TNB sendiri dalam menyikapi upaya manipulasi legitimasi politik yang dilakukan politisi tersebut.

b. Memasang Foto dengan Tuan guru dalam Spanduk

Legitimasi lain yang dilakukan politisi lokal adalah memasang foto politisi dengan tuan guru dalam spanduk yang kemudian dipasang di ruang publik. Pemasangan foto dengan tuan guru tentunya dimaksudkan sebagaimana bentuk pertama, yang juga tidak mendapatkan izin dari tuan guru atas kesediaan fotonya dipajang di ruang publik (Syarwani, 07/07/2013). Pemasang foto ini tentu saja dimaksudkan bahwa—seakan—tuan guru sebagai pimpinan institusi tarekat telah memberikan dukungan politik kepada politisi tertentu yang memasang foto. Sebab, foto merupakan sebuah bentuk gambaran yang menegaskan tentang isi dari foto itu sendiri, maka ketika ada foto tuan guru dengan politisi tertentu tentu saja dapat dimaknai sebagai bentuk legitimasi politik.

Menarik dikemukakan di sini, ada temuan yang berkaitan dengan memanipulasi foto murysid yang dilakukan politisi ketika pelaksanaan haul yang memasang foto murysid dengan seorang politisi, yang justru menimbulkan sikap protes dari sebagian kalangan jamaah TNB hingga akhirnya spanduk tersebut harus diturunkan (Athardin, 07/07/2013), tetapi proses penurunannya dilakukan setelah puncak kegiatan haul yang menciptakan terkumpul masa diadakan TNB. Namun, di saat yang bersamaan pula ada juga politisi yang memasang spanduk di ruang publik pada wilayah kompleks persulukan TNB, tetapi tidak mendapat reaksi sebagaimana pertama karena politisi tersebut merupakan bagian dari zuriat TNB itu sendiri. Temuan yang dikemukakan ini sebenarnya menunjukkan adanya legitimasi simbolik tersembunyi yang dilakukan TNB, terutama keberpihakan kepada bagian dari kelompok TNB itu sendiri.

c. Menghadiri Haul Pendiri Tarekat

Legitimasi yang dianggap penting bagi politisi lokal adalah menghadiri perayaan haul pendiri tarekat. Pilihan menghadiri haul ini tampaknya sangat berkaitan dengan suasana perayaan yang menjadi bagian dari perayaan keagamaan versi ordo tarekat yang paling banyak dikunjungi masyarakat, baik dari kalangan jamaah TNB itu sendiri yang berada di daerah tersebut ataupun luar daerah juga dihadiri oleh masyarakat umum hanya sekedar untuk menyaksikan keramaian dari pelaksanaan perayaan haul tersebut. Pelaksanaan perayaan haul tersebut tentu saja dalam pandangan politisi lokal merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk mempopulerkan diri dan di antara politisi ada yang mengambil bagian dari berbagai ritual yang dilaksanakan dalam perayaan tersebut. Keterlibatan dalam perayaan haul tentunya merupakan

sesuatu bentuk pencitraan karena dalam pelaksanaan perayaan ini semua masyarakat turut serta hadir melaksanakan, yang mana tentunya masyarakat akan memiliki penilaian tersendiri terhadap sosok politisi yang terlibat dalam ritual pelaksanaan perayaan haul tersebut.

Bentuk legitimasi simbolik politik lainnya dalam menghadiri haul pendiri tarekat—yang juga umum dilakukan politisi—adalah memberikan sumbangan pada dan untuk keperluan perayaan haul dalam bentuk berbagai jenis sumbangan seperti makanan, minuman, jasa dan lainnya (Qahar, 11/08/2013). Sumbangan ini tentu saja memiliki makna tersendiri bagi jamaah TNB dalam menilai politisi karena—selain kuatnya ikatan dan simpatisan terhadap hal yang dekat dengan TNB—politisi tersebut telah ikut serta mensukseskan perayaan haul yang dalam pandangan jamaah TNB merupakan sesuatu yang sangat penting dilaksanakan setiap tahunnya, maka sebagai respon balik dari jamaah akan memberikan dukungan emosional dan moral terhadap politisi yang dianggap “berjasa” dalam mensukseskan haul. Kehadiran politisi lokal pada perayaan haul ini, selain sebagai penegasan sikap dukungan terhadap pelaksanaan haul juga bentuk pengakuan terhadap eksistensi TNB itu sendiri sebagai bagian dari ordo keagamaan yang sangat penting bagi masyarakat.

d. Memanfaatkan Jabatan dalam Kegiatan TNB

Legitimasi lain yang dilakukan politisi lokal yang tidak umum dilakukan politisi dan hanya politisi tertentu yang memiliki jabatan yang berkaitan langsung ataupun tidak dengan TNB. Pemanfaatan jabatan ini tentu saja merupakan sesuatu yang berbeda dengan legitimasi simbolik politik umumnya karena politisi ini memiliki jabatan yang dapat saja dijadikan sebagai bagian dari upaya pengukuhan kekuasaan ataupun juga upaya mobilisasi masa dengan berbagai teknik dan strategi yang dilakukan. Pemanfaatan kekuasaan ini tidak diketahui jamaah ataupun masyarakat bahwa politisi telah melakukan manipulasi jabatan untuk memperoleh legitimasi simbolik politik dari TNB berdasarkan jabatan yang dimiliki karena memang posisi jabatan yang dipegang politisi ini berkaitan khusus dengan kepentingan yang ada pada TNB.

Dalam kaitan ini, menarik dikemukakan bentuk pemanfaatan jabatan dalam memperoleh legitimasi simbolik politik seperti misalnya memberikan sambutan resmi yang dilakukan oleh Pejabat Kepala Daerah dalam pelaksanaan haul tersebut. Sebab, pelaksanaan haul juga melibatkan Kepala Daerah sebagai pimpinan yang mengurus semua kepentingan masyarakat yang ada di daerah TNB

itu sendiri. Dalam sambutan Kepala Daerah menunjukkan bentuk kedekatan dan simpatisan yang mendalam terhadap TNB, sehingga ada kesan anggapan di kalangan jamaah bahwa Kepala Daerah itu sendiri merupakan bagian dari TNB itu sendiri. Tidak hanya itu, Kepala Daerah juga menjadikan TNB sebagai bagian dari aset daerah dengan memasukkan dalam visi dan misi kepemimpinan untuk memperkuat adanya dugaan bahwa Kepala Daerah sebagai pemimpin pelindung segala kepentingan TNB.

Legitimasi dalam bentuk sambutan yang cenderung menegaskan sikap simpati ini jelas memberikan penilaian tersendiri bagi jamaah yang hadir pada perayaan haul tersebut. Tidak hanya itu, perayaan haul ini juga dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik, baik oleh panitia pelaksanaan perayaan ataupun pihak politisi itu sendiri, semakin mengukuhkan penegasan tentang adanya legitimasi simbolik TNB pada politisi tersebut. Dalam bentuk lain legitimasi simbolik politik yang dilakukan politisi berkaitan dengan jabatan adalah memanfaatkan publikasi kegiatan TNB di luar perayaan haul dengan mengambil posisi sebagai orang yang bertanggungjawab dan pelindung bagi TNB. Dalam hal ini, TNB juga memiliki kepentingan terhadap posisi politisi ini sebagai legitimasi terhadap segala bentuk kegiatan yang dilakukan di TNB.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan tentang bentuk-bentuk legitimasi simbolik politik yang dilakukan politisi lokal ini menunjukkan bahwa sebenarnya legitimasi yang dibangun politisi merupakan bentuk dari manipulasi kecenderungan moral dan emosi jamaah dan masyarakat untuk membangun pencitraan. Namun, di sisi lainnya TNB sendiri juga mengambil keuntungan dalam keterlibatan politisi dalam berbagai momen kegiatan yang diadakan di TNB, baik sebagai pelindung dan juga sebagai pendukung terwujudnya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi sejauh ini TNB masih mempertimbangkan sisi kepentingan TNB itu sendiri dalam keterlibatan ziarah politisi ke TNB.

E. Penutup

Sebagai penutup artikel ini penulis ini memberikan beberapa jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah sebagaimana yang telah diajukan sebelumnya, yaitu perilaku ziarah politisi lokal ke TNB ini dapat dijelaskan dalam dua bentuk kategori, yaitu a) mekanisme ziarah yang dilakukan politisi lokal dilakukan dengan adanya koordinasi dengan pihak pengelola TNB tentang kesediaan tuan guru untuk menerima atau penentuan kapan waktu yang tepat politisi datang ke TNB. Dalam proses koordinasi ini

terjadi proses tawar menawar waktu antara kesediaan tuan guru dan kesempatan waktu yang dimiliki politisi lokal b) ritual yang dilakukan dalam pelaksanaan ziarah ini politisi atas rekomendasi tuan guru melakukan ritual pembacaan yasin 41 yang dilakukan proses pembacaan surah yasin sebanyak 41 jamaah, setelah itu diakhiri dengan doa yang dipimpin langsung oleh tuan guru untuk meminta kepada Tuhan permohonan politisi lokal tersebut. Selain itu, ritual lain yang dilakukan politisi lokal adalah ziarah ke makam pendiri TNB, yang mana di dalam makam ini juga dilakukan ritual pembacaan zikir dan doa yang dipandu petugas khusus dengan menyebutkan niat dan tujuan politisi lokal berziarah ke TNB.

Legitimasi simbolik politik yang dilakukan politisi lokal berdasarkan temuan ini setidaknya dapat diidentifikasi dalam 4 (empat) bentuk legitimasi, yaitu a. publikasi kunjungan ziarah melalui media cetak dan elektronik yang kemudian disebarluaskan via sms dan media sosial seperti facebook dan twiter b. memasang foto dengan tuan guru dalam spanduk di ruang publik di wilayah yang berdekatan dengan TNB ataupun tempat-tempat yang dianggap strategis c. menghadiri haul pendiri tarekat sebagai simpatisan pelaksanaan perayaan ataupun peserta dalam kegiatan dan juga memberikan sumbangan yang dianggap dalam membantu proses perayaan yang dilaksanakan dan d. memanfaatkan jabatan dalam kegiatan TNB sebagai pelindung dan perwakilan pemerintah.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Bruinessan, Martin van, (1992), “Tarekat dan Politik: Amalan untuk Dunia atau Akherat?”, dalam *Majalah Pesantren*, Vol. ix, No. 1.
- Geertz, Clifford (1981), *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Guillot, Claude dan Hendri Chambert-Lior, (2007), “Makam Sunan Gunung Jati”, dalam Claude Guillot dan Hendri Chambert-Lior. ed., *Ziarah dan Wali di Dunia Islam*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta bekerjasama dengan Ecole Francaise d’Extreme-Oriental dan Forum Jakarta-Paris\.
- Huda, Sokhi (2008), *Tasawuf Kultural: Fenomena Shalawat Wahidiyah*, Yogyakarta: LKIS.
- Said, Fuad (1983), *Syeikh Abdul Wahab Rokan: Tuan Guru Babussalam*, Medan: Pustaka Babussalam.
- Sajaroh, Wimi Siti, (2005), “Tarekat Naqsyabandiyah: Menjalani Hubungan Harmonis dengan Kalangan Penguasa”, dalam Sri Mulyani, *Mengenal dan Memahami Tarekat-tarekat Muktabarab di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Surbakti, Ramlan (1993), *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo.
- Thohir, Ajid dan Dedi Ahimsa Riyadi (2002), *Gerakan Politik Kaum Tarekat: Telaah Historis Gerakan Politik Antikonialisme Tarekat Qadiriyyah Naqsyabandiyah di Pulau Jawa*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Weismann, Itzchak (2007), *The Naqsbbandiyya: Orthodoxy and Activism in a Worldwide Sufi Tradition*, New York: Routledge.
- Ziaulhaq, (2012), “Doktrin Poligami Kaum Tarekat: Studi Pandangan Jamaah tentang Praktek Poligami Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Babussalam (TNB)” (Laporan Penelitian: Fakultas Dakwah, IAIN Sumatera Utara.

Interviewe

- Aslim Sihotang (56 Tahun)
Athardin (52 Tahun).
Hasyim Syarwani (56 Tahun)
Ismail (50 Tahun)
Qahar (42 Tahun)